

Wajah Ganda Kekerasan Negara

Oleh Triyono Lukmantoro

Pertemuan Rieke Diah Pitaloka, Nur Suhud, dan Ribka Tjiptaning dari PDI-P dengan eks korban Orde Baru di Banyuwangi dibubarkan Front Pembela Islam (FPI). Pembubaran dilakukan dengan dalih bahwa acara itu sebagai gerakan membangkitkan ajaran komunisme. FPI menuding acara itu ilegal karena tidak punya izin dari pihak keamanan. Atas perlakuan FPI itu, Ribka Tjiptaning melaporkan organisasi itu kepada kepolisian. FPI dianggap melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan mengganggu pejabat negara dalam menjalankan tugasnya. Bahkan, di DPR telah terbentuk Kaukus Pancasila Parlemen untuk menyikapi ulah FPI itu. Muncul pula tuntutan agar FPI dibubarkan (*Tempo Interaktif*, 28 Juni 2010).

Membubarkan acara dengan dalih apa pun tidak dapat dibenarkan. Apalagi pihak yang membubarkan adalah elemen-elemen dari masyarakat. Perilaku sejenis itu pantas disebut sebagai anarki. Pihak yang memiliki otoritas menjalankan pembubaran acara apa pun, dan penangkapan terhadap orang-orang yang dianggap menjalankan kemaksiatan, adalah negara. Hal ini disebabkan negara merupakan kekuasaan legal yang diperbolehkan melakukan kekerasan.

Pada ranah ini kita dapat memahami gagasan Thomas Hobbes (1588-1679) yang menganjurkan negara harus tampil sebagai kekuatan raksasa yang bersikap keras terhadap warganya. Negara Hobbesian menjelmakan diri sebagai Sang Leviathan yang menakutkan. Hanya dengan pengerahan teknik teror yang sistematis, negara bisa menundukkan warga untuk tidak saling bertarung sendiri di antara mereka. Tertib sosial terjaga. Kehidupan harmonis tercipta.

Pemikir besar lain yang membenarkan negara menjalankan kekerasan adalah Max Weber (1864-1920). Weber menyatakan negara adalah komunitas manusia yang (sukses) mengklaim memonopoli penggunaan kekerasan fisik yang sah dalam wilayah tertentu. Weber mengutip pernyataan yang dikemukakan Leon Trotsky (1879-1940): “Setiap negara didirikan di atas paksaan”. Apabila tidak ada lembaga-lembaga sosial yang bereksistensi tanpa kekerasan, maka konsep negara tereliminasi. Kondisi yang muncul adalah anarki.

Dari pemikiran Hobbes dan Weber, kita memahami bahwa kekerasan sengaja dilakukan negara untuk menghadirkan ketertiban sosial. Negara dipandang harus

memiliki kekerasan berlipat ganda, dalam bentuk organisasi polisi dan militer, untuk menundukkan aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat. Itulah wajah kekerasan negara pertama yang dimaksudkan untuk menggelar kebaikan.

Menjadi mitos

Namun, menciptakan tatanan sosial dengan menggunakan kekerasan menjadi mitos yang menyesatkan. Kekerasan pasti melahirkan kekerasan. Kejadian itu disebut sebagai spiral kekerasan. Kekerasan hanya menciptakan dendam dan menanamkan kebencian. Siapa pun yang terpesona dengan kekerasan negara harus menyiapkan diri untuk menerima kekerasan lanjutan. Kekerasan menciptakan hukum besi yang saling berbalasan. Itulah problem yang harus diterima negara ketika menjalankan sistem yang memuja kekerasan. Hal tersebut merupakan wajah kekerasan negara kedua yang tidak mendorong terciptanya kebaikan, melainkan malapetaka.

Ironisnya, negara memungkiri hukum besi kekerasan yang beroperasi secara berbalasan itu. Negara semakin memperkokoh kekerasan dengan cara membentengi setiap wilayahnya dengan berbagai jenis bala pasukan. Pada setiap level administratif, negara menghadirkan kekuatan polisional. Seakan-akan dengan modus itu, berbagai kebijakan negara dapat diselamatkan dari ancaman kerusakan. Padahal, mengerahkan pasukan keamanan tanpa sudi untuk melihat problem kemiskinan yang terus-menerus membelit warga adalah menunggu momentum kekerasan meletup lebih hebat lagi. Kesenjangan kaya-miskin tidak dapat dilenyapkan dengan kekerasan.

Dalam kondisi demikian, kita harus membaca gagasan Johan Galtung tentang segitiga kekerasan yang mempertautkan kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural. Mereka yang tewas, korban-korban yang terluka parah, harta benda yang terbakar, kaum terbuang, dan apa pun yang menghancurkan peradaban adalah kekerasan langsung. Kekerasan yang bersifat kasat mata itu tidaklah berdiri sendiri. Kekerasan itu adalah akibat dari kekerasan struktural dan kekerasan kultural yang tidak terlihat. Jalinan yang terjadi antara kekerasan yang tidak terlihat dengan kekerasan yang konkret sebegitu akrab.

Kekerasan struktural terbangun dalam sistem sosial dan mengekspresikan dirinya pada distribusi kekuasaan yang timpang. Kenyataan ini dapat diidentifikasi dengan merebaknya kesenjangan untuk mendapatkan penghasilan, ketimpangan di bidang pendidikan, atau eksploitasi yang tidak pernah berhenti. Kekerasan struktural adalah nama lain dari ketidakadilan sosial. Sedangkan kekerasan kultural merupakan

aspek-aspek budaya yang dipakai untuk membenarkan dan melegitimasi pemakaian kekerasan langsung atau kekerasan struktural. Setiap pihak mempunyai nilai-nilai rujukan untuk mengobarkan kekerasan.

Negara bisa menghadirkan aparat keamanan dengan segenap senjatanya yang melumpuhkan warga, seperti pentungan, senapan, gas air mata, dan tameng. Namun, warga mempunyai seperangkat perkakas perlawanan dalam bentuk identitas diri sebagai kaum marjinal, batu dan benda apa pun yang dapat dilontarkan, atau senjata tajam yang digunakan untuk melukai aparat keamanan. Pertarungan yang terjadi bukan warga dengan warga yang dalam imajinasi Hobbes adalah “manusia menjadi serigala bagi sesamanya”, tapi negara dengan warganya. Anarki yang dicemaskan Weber memang mencuat, tapi dalam kekacauan yang justru dilahirkan negara sendiri.

Ruang dialogis

Kekerasan negara yang menghasilkan penyeragaman penanganan dengan cara mengerahkan kekuatan polisional bisa direduksi jika negara sudi membuka ruang-ruang dialogis. Hal itu juga dapat dilakukan seluruh elemen masyarakat, sehingga kekerasan di antara kelompok sosial mampu dihindarkan. Dalam domain ini, etika komunikasi menjadi kunci yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Dialog bukan sekadar dorongan bagi masing-masing pihak untuk berbicara sendiri-sendiri. Jika hal ini yang terjadi, maka kejadian yang bergulir adalah dua monolog yang saling bertikai.

Dialog, ungkap Martin Buber (1878-1965), terjadi jika relasi yang terbentuk merupakan *I-Thou* (Aku-Engkau), dan bukan *I-It* (Aku-Benda). *I-Thou* menunjukkan jalinan subyek dengan subyek. Resiprositas dan mutualitas merupakan tujuan yang dicapai. Masing-masing pihak saling membuka diri dan hormat terhadap ikatan antara dua pihak merupakan keniscayaan. Manusia diperlakukan sebagai sesama manusia. Sebaliknya, *I-It* menunjukkan relasi subyek dengan obyek. Hal yang terjadi ialah satu pihak memakai dan mengontrol pihak lain tidak lebih sebagai benda mati.

Jalinan *I-Thou* tidak mungkin direalisasikan jika rezim kekerasan negara dan masyarakat tetap digulirkan. Perilaku negara dan elemen warga yang secara kontinyu menggunakan kekerasan pada titik kulminasinya hanya mencuatkan relasi *I-It* belaka. Negara tidak lagi melihat warga sebagai subyek yang harus dihormati. Sebaliknya, warga pun menatap negara sebagai obyek yang wajib dimusuhi. Hal yang sama pun terjadi apabila sesama elemen warga bertindak saling mengobyektivikasi. Sehingga, tindakan yang saling menghancurkan tidak mungkin bisa dicegah. Apalagi jika negara

menjadi instrumen bagi kaum pemilik modal untuk bersembunyi. Negara berposisi sebagai agen dominasi kelas sosial. Pada sisi lain, elemen warga yang sangat dikenal menyukai aksi-aksi kekerasan hanya bertindak atas dasar fanatisme yang buta.

Negara yang seharusnya menjadi kekuatan yang memproteksi warga justru bertindak bagaikan gerombolan serigala yang memangsa sekumpulan domba. Dalam kerusuhan yang melibatkan aparat kekerasan negara, warga tidak sudi menjadi domba pengorbanan. Warga pun beraksi beringas bagai kawan serigala yang ganas apabila negara justru membiarkan kekerasan yang dilakukan sekelompok warga lain. Itulah peristiwa ketika manusia menjadi serigala bagi sesamanya.

* * *

Triyono Lukmantoro, dosen FISIP Universitas Diponegoro Semarang.

(Wawasan, 30 Juni 2010)